

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Konsep Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai kemampuan ekonomi nasional, di mana keadaan ekonominya mula-mula relatif statis selama jangka waktu yang cukup lama untuk dapat menaikkan dan mempertahankan laju pertumbuhan PDB-nya hingga mencapai 5 sampai 7 persen atau lebih per tahun (Arsyad, 2010:11). Pengertian pembangunan ekonomi ini mengalami perubahan karena berdasarkan pengalaman pada tahun 1950-an dan 1960-an, di mana kebijakan-kebijakan pembangunan ditujukan terutama untuk maksimisasi pertumbuhan PDB melalui proses akumulasi modal dan industrialisasi. Oleh karena adanya pandangan yang tidak mempercayai mekanisme pasar dan pendapat tentang terjadinya kegagalan pasar (*market failure*), maka pemerintah mengambil kebijakan-kebijakan antara lain menerapkan sistem perencanaan terpusat untuk meningkatkan investasi modal fisik, pemanfaatan surplus tenaga kerja, pengembangan Industri Substitusi Impor (ISI), dan mencari bantuan luar negeri. Strategi pembangunan saat itu ditekankan pada pembangunan ekonomi, khususnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Strategi pembangunan yang berorientasikan pada pertumbuhan PDB ini dianggap tidak akan mampu memecahkan permasalahan-permasalahan pembangunan yang mendasar di Negara Sedang Berkembang (NSB). Hal ini

tampak pada taraf hidup dan kualitas masyarakat di NSB yang tidak mengalami perbaikan meskipun target pertumbuhan PDB per tahun telah tercapai. Artinya, bahwa ada tanda-tanda kesalahan besar dalam mengartikan istilah pembangunan ekonomi secara sempit. Oleh karena itu, Todaro & Smith (2003) menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara ditunjukkan oleh tiga nilai pokok yaitu (Todaro, 2010:11):

1. Berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya;
2. Meningkatnya rasa harga diri (*self-esteem*) masyarakat sebagai manusia;
3. Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (*freedom from servitude*) yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia.

Akhirnya disadari bahwa definisi pembangunan ekonomi itu sangat luas dan bukan hanya berbicara tentang bagaimana meningkatkan PDB per tahun saja. Pembangunan ekonomi bersifat multidimensional yang mencakup berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat, bukan hanya salah satu aspek (ekonomi) saja. Pembangunan ekonomi dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan.

Definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan ekonomi mempunyai unsur-unsur pokok dan sifat sebagai berikut:

1. Suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi secara kontinu;
2. Usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita;

3. Peningkatan pendapatan per kapita itu harus terus berlangsung dalam jangka panjang;
4. Perbaikan sistem kelembagaan di segala bidang (misalnya ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya).

2.1.2 Transformasi Struktural

Chennery & Syrquin (1975) menyatakan bahwa pembangunan dapat dipandang sebagai suatu proses transisi multidimensional yang mencerminkan hubungan antar berbagai proses perubahan di dalam suatu negara. Proses perubahan multidimensional tersebut ditandai oleh proses transformasi struktural. Proses transformasi struktural ditandai oleh perubahan struktur ekonomi yang dicerminkan oleh perubahan kontribusi sektoral (*shift-share*) di dalam pendapatan nasional.

Perekonomian pada awalnya bersifat subsisten dengan sektor pertanian tradisional sebagai basisnya kemudian beralih menjadi perekonomian yang lebih modern dengan sektor industri pengolahan dan jasa sebagai motornya. Proses transformasi struktural itu sendiri, menurut Chennery & Syrquin (1975) dapat dikelompokkan ke dalam empat proses utama di bawah ini (Todaro, 2010:13-17):

2.1.2.1 Proses Akumulasi

Akumulasi dapat didefinisikan sebagai penggunaan sumberdaya untuk meningkatkan kapasitas produksi suatu perekonomian. Kenaikan kapasitas produksi tersebut pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan nasional. Ada

dua perubahan yang menyertai proses kenaikan tingkat pendapatan nasional tersebut yaitu:

- 1) Efek langsung dari kenaikan pendapatan terhadap aspek tertentu dari kegiatan ekonomi yang ditunjukkan oleh perubahan kecenderungan menabung atau mengkonsumsi atau elastisitas kurva Engel dari permintaan konsumen;
- 2) Efek secara tidak langsung dari kenaikan pendapatan terhadap perubahan komposisi produksi, perdagangan, ketenagakerjaan, dan perubahan hal-hal yang bersifat struktural lainnya.

Ada tiga jenis modal yang dibutuhkan dalam proses akumulasi yaitu:

- (1) Stok modal fisik (*capital stock*). Akumulasi modal terjadi apabila sebagian dari pendapatan yang tidak dibelanjakan ditabung dan kemudian diinvestasikan kembali dengan tujuan untuk memperbesar *output* di kemudian hari. Stok modal dipengaruhi oleh dua hal yaitu nilai tabungan dan nilai investasi. Pengadaan pabrik baru, mesin-mesin, peralatan dan bahan baku dinilai mampu untuk meningkatkan stok modal fisik dari suatu negara sehingga pada gilirannya akan memungkinkan negara tersebut mencapai *output* yang lebih besar.
- (2) Modal insani (*human capital*). Pengembangan pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak hanya distimulasi oleh modal fisik tetapi juga modal insani yang dinilai mampu menjadi motor penggerak kemajuan ekonomi negara-negara maju. Pengembangan modal insani ini dapat dilakukan melalui jalur pendidikan dan kesehatan.

(3) Modal sosial (*social capital*). Menurut Putnam (1993) dalam Dasgupta & Serageldin (2000), modal sosial dapat didefinisikan sebagai serangkaian nilai-nilai atau norma informal yang berlaku di antara anggota dari sebuah kelompok yang memungkinkan mereka untuk saling bekerjasama satu sama lain. Menurut para pakar ekonom, modal sosial memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Dasgupta & Serageldin, 2000) yaitu: pada tingkat mikroekonomi, para ekonom menganggap bahwa modal sosial terutama sekali memperbaiki bekerjanya pasar, sedangkan pada tingkat makroekonomi, para ekonom memperhatikan bagaimana institusi, kerangka hukum, dan peranan pemerintah di dalam mengorganisir produksi mempengaruhi kinerja ekonomi makro.

2.1.2.2 Proses Alokasi

Proses alokasi sumberdaya mengakibatkan perubahan yang sistematis pada komposisi sektoral pada permintaan domestik, perdagangan internasional, dan tingkat produksi seiring dengan kenaikan tingkat pendapatan. Perubahan tersebut disebabkan oleh interaksi antara efek permintaan karena kenaikan pendapatan dengan efek penawaran karena perubahan proporsi faktor produksi dan teknologi. Proporsi pendapatan yang dialokasikan untuk konsumsi atas barang pangan akan menurun. Hal itu terjadi karena adanya kenaikan proporsi pendapatan yang dialokasikan untuk konsumsi atas barang nonpangan. Perubahan pada proporsi faktor produksi sebagai akibat dari pertumbuhan modal fisik, modal insani, dan

teknologi akan mengakibatkan perubahan pada penawaran faktor produksi, orientasi alokasi sumberdaya dan perdagangan

Ada dua asumsi yang mendasari argumen yang menghubungkan antara tingkat produksi dengan permintaan domestik yaitu:

- 1) Elastisitas harga permintaan domestik pada kelompok-kelompok komoditas utama adalah relatif rendah, sehingga pola konsumsinya lebih dipengaruhi oleh tingkat pendapatan.
- 2) Tingkat perdagangan internasional (ekspor-impor) tidak terlalu besar sehingga tidak mampu menutup kesenjangan antara permintaan dan penawaran domestik pada komoditas-komoditas utama.

Analisis tentang proses alokasi sumberdaya dapat pula diturunkan dari beberapa teori perdagangan internasional. Teori Hecksher-Ohlin (H-O) menyatakan bahwa keunggulan komparatif suatu negara tergantung pada proporsi faktor produksi. Pertumbuhan modal dan keterampilan insani yang relatif tinggi dibandingkan dengan tenaga kerja tidak terampil (*unskilled labor*) akan mendorong pertumbuhan ekspor barang-barang manufaktur.

Pergeseran pada komposisi ekspor juga didukung oleh teori Linder tentang permintaan representatif, yang menyatakan bahwa suatu negara memperoleh keunggulan komparatif di industri manufaktur dengan cara memproduksi untuk pasar domestik terlebih dahulu. Hal ini dapat dilakukan melalui inovasi dan proses belajar (*learning by doing*), dengan biaya produksi relatif dan pola ekspor dianggap akan mengikuti perubahan pola permintaan domestik. Oleh karena itu,

kedua teori itu bersifat komplementer dan secara bersama memprediksi suatu pergeseran dari produksi dan ekspor barang primer menuju industri manufaktur.

2.1.2.3 Proses Distribusi

Distribusi pendapatan dipengaruhi oleh berbagai proses seperti tingkat pendidikan, struktur produksi, dan ketersediaan anggaran pemerintah untuk redistribusi. Distribusi pendapatan juga dipengaruhi oleh sosioekonomis lainnya seperti tingkat kematian, tingkat kesuburan, dan urbanisasi – yang berkaitan erat dengan tingkat pendapatan. Secara Konseptual, proses distribusi di sebagian besar Negara Sedang Berkembang (NSB) dipengaruhi oleh:

- 2.2 Pertumbuhan sektoral secara relatif dan moda produksi (modern atau tradisional);
- 2.3 Pertumbuhan pada jumlah, tingkat pendidikan, dan distribusi sektoral angkatan kerja;
- 2.4 Kepemilikan aset pada dan tingkat tabungan secara relatif dari setiap kelompok masyarakat yang berbeda;
- 2.5 Kebijakan-kebijakan pemerintah yang mendukung mekanisme pemerataan (substitusi faktor produksi, pendidikan, dan redistribusi aset).

Berkaitan dengan distribusi pendapatan, berdasarkan pengalaman negara-negara maju Kuznets (1955) dan Myrdal (1957) mengungkapkan bahwa pada awalnya proses industrialisasi dan urbanisasi seiring dengan proses transformasi struktural akan berdampak pada memburuknya distribusi pendapatan, karena kontribusi sektoral terkonsentrasi pada sektor modern. Pendapatan yang diperoleh

dari sektor tradisional tidak hanya lebih rendah tetapi juga lebih timpang apabila dibandingkan dengan pendapatan di sektor modern. Tahap berikutnya, pemerataan distribusi pendapatan terjadi dengan sendirinya.

2.1.2.4 Proses Demografis

Berdasarkan pengalaman empiris di negara-negara maju, proses transisi demografis selalu mengiringi terjadinya transformasi struktural, dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat industri yang kapitalistik. Proses transisi demografis ini ditandai dengan rendahnya tingkat kelahiran dan tingkat kematian serta struktur penduduk yang sebagian besar pada usia produktif sehingga diperoleh tingkat komposisi populasi yang “sempurna”. Kenyataannya proses tersebut memerlukan waktu yang cukup lama dan memiliki pola yang berbeda pada tiap negara tergantung pada kondisi domestik dari masing-masing negara.

Satu hal yang senantiasa mengiringi proses transformasi struktural adalah urbanisasi. Adanya urbanisasi secara langsung memperburuk kesenjangan struktural antara desa dan kota dalam dua hal yaitu (Todaro & Smith, 2003):

- 1) Di sisi penawaran, urbanisasi akan meningkatkan jumlah pencari kerja di wilayah perkotaan melampaui daya dukung perekonomian kota, sementara persediaan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh sektor-sektor produktif di pedesaan semakin menurun
- 2) Di sisi permintaan, penciptaan kesempatan kerja di perkotaan lebih sulit daripada penciptaan lapangan kerja di pedesaan, karena jenis pekerjaan di

sektor-sektor modern di perkotaan lebih membutuhkan input-input komplementer dibandingkan input tenaga kerja.

Proses transformasi juga berpengaruh pada sisi tenaga kerja yakni terjadinya migrasi secara besar-besaran dari sektor tradisional di pedesaan ke sektor modern di perkotaan. Sektor tradisional merupakan pemasok tenaga kerja bagi sektor modern. Adanya urbanisasi mengakibatkan perbedaan struktur tenaga kerja antar sektor tradisional dan modern. Pertumbuhan tenaga kerja yang cukup pesat di sektor modern dinilai mampu menstimulasi peningkatan output di sektor tersebut. Beda halnya dengan sektor tradisional yang mengalami penurunan tingkat output dinilai menjadi satu konsekuensi dari proses transformasi yang terus berjalan.

2.1.3 Teori Perubahan Struktural

Teori perubahan struktural (*structural-change theory*) berfokus pada mekanisme yang diterapkan negara-negara terbelakang untuk mengubah struktur perekonomian domestik, yang awalnya lebih menekankan pada pertanian subsisten tradisional menjadi perekonomian yang lebih modern, berorientasi perkotaan, serta industri manufaktur dan jasa yang lebih beragam (Todaro, 2011:140). Ada dua teori utama yang menggunakan pendekatan perubahan struktural, yaitu teori pembangunan Lewis atau model teoritis “surplus tenaga kerja dua-sektor” (*two-sector surplus labor*) dari W. Arthur Lewis dan analisis empiris “pola pembangunan” (*patterns of development*) dari Hollis B. Chenery dan kawan-kawan.

2.1.3.4 Teori Pembangunan Lewis

Salah satu model teoritis awal tentang pembangunan yang berfokus pada transformasi struktural (*structural transformation*) perekonomian subsisten primer yang dirumuskan W. Arthur Lewis di pertengahan dasawarsa 1950-an. Transformasi struktural yang dimaksud di atas yaitu proses transformasi perekonomian sedemikian rupa sehingga kontribusi sektor manufaktur terhadap pendapatan nasional akhirnya melampaui kontribusi sektor pertanian. Secara umum, suatu perubahan besar terhadap komposisi industri dalam perekonomian.

Model dua-sektor Lewis (*Lewis two-sector model*) adalah teori pembangunan yang mengemukakan bahwa surplus tenaga kerja dari sektor pertanian tradisional ditransfer ke sektor industri modern yang pertumbuhannya menyerap kelebihan tenaga kerja, mendorong industrialisasi, dan menggerakkan pembangunan berkelanjutan. Model ini menjadi teori umum yang menjelaskan proses pembangunan di negara-negara berkembang yang memiliki surplus tenaga kerja selama hampir keseluruhan dasawarsa 1960-an dan awal 1970-an dan adakalanya masih diterapkan, khususnya untuk mempelajari pasar tenaga kerja di negara-negara berkembang. Berdasarkan model Lewis, perekonomian terbelakang terdiri atas dua sektor yaitu sektor subsisten pedesaan yang tradisional dengan produktivitas marginal tenaga kerja sama dengan nol (*zero marginal labor productivity*), di mana situasi ini digolongkan Lewis sebagai surplus tenaga kerja (*labor surplus*) karena tenaga kerjanya dapat diambil dari sektor pertanian tradisional tanpa mengakibatkan kerugian output apapun; dan sektor industri

modern perkotaan yang sangat produktif sebagai sektor yang menampung transfer tenaga kerja dari sektor subsisten (Todaro, 2011:140).

Fokus utama dari model ini adalah pada proses transfer tenaga kerja maupun pertumbuhan output dan lapangan kerja di sektor modern. Transfer tenaga kerja maupun pertumbuhan lapangan kerja timbul karena adanya perluasan (ekspansi) output yang dihasilkan sektor modern. Laju perluasan ditentukan oleh tingkat investasi dan akumulasi modal yang terjadi di sektor modern. Investasi ini dimungkinkan karena jumlah keuntungan atau laba sektor modern melebihi jumlah upah, dengan asumsi bahwa para pemilik modal menginvestasikan kembali semua keuntungan mereka.

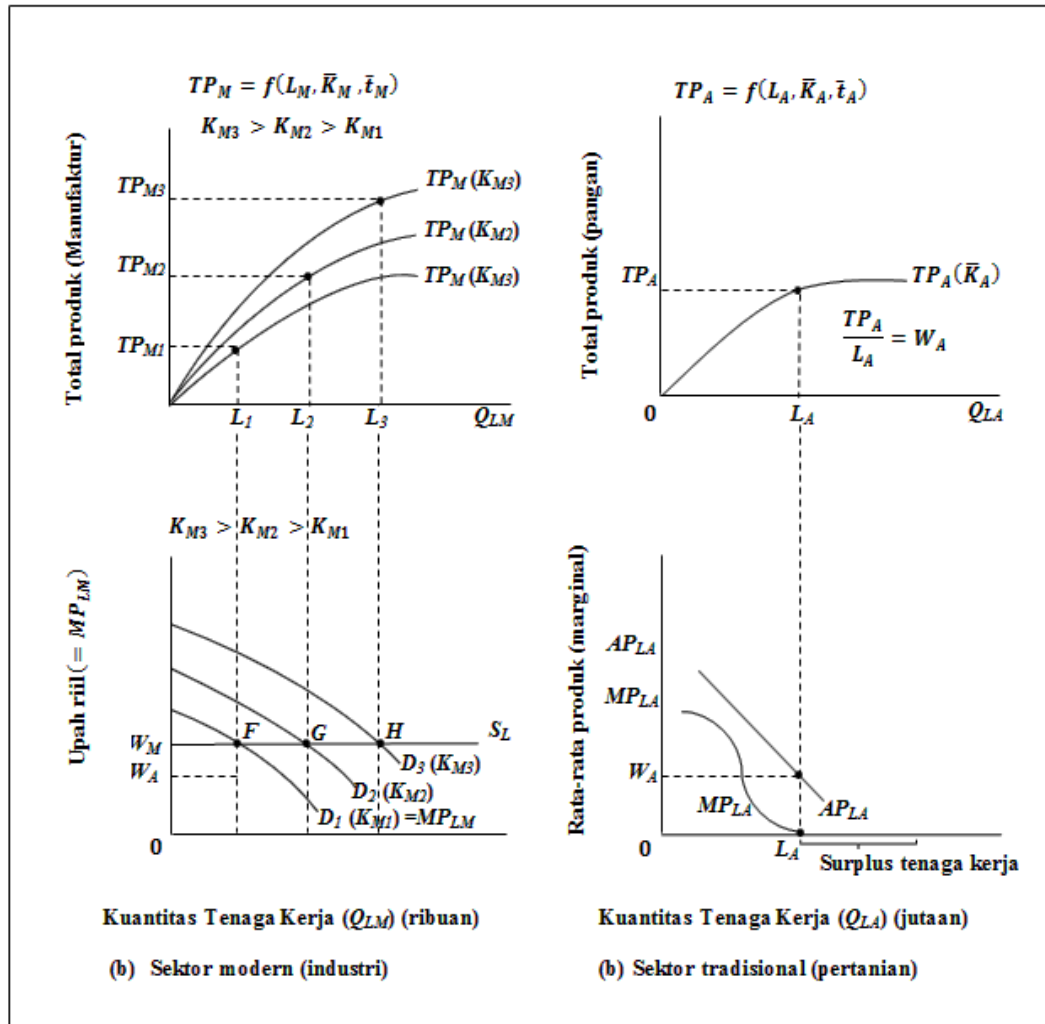
Model pertumbuhan sektor-modern dalam perekonomian dua-sektor Lewis dapat dilihat pada gambar 2.1 (Todaro, 2011:141-144). Pertama, perhatikan sektor pertanian tradisional yang diperlihatkan dengan dua diagram di bagian kanan Gambar 2.1b. Diagram bagian atas menunjukkan bagaimana produksi pangan subsisten berubah seiring meningkatnya input (masukan) tenaga kerja. Hal ini menunjukkan fungsi produksi (*production function*) sektor pertanian yang khas, yang berarti total output atau produk (TP_A) pangan ditentukan oleh perubahan jumlah satu-satunya variabel input yaitu tenaga kerja (L_A), dengan asumsi kuantitas modal, K_A , dan teknologi, t_A , tidak berubah. Diagram bagian bawah kanan memperlihatkan kurva produk rata-rata (*average product*) dan produk marginal (*marginal product*) tenaga kerja, AP_{LA} dan MP_{LA} , sebagai turunan dari kurva produk total yang digambarkan persis di atasnya. Kuantitas tenaga kerja

pertanian, (Q_{LA}) yang tersedia dan dinyatakan dalam jutaan orang di kedua sumbu horizontal adalah sama.

Ada dua asumsi Lewis mengenai sektor tradisional. Pertama, terdapat surplus tenaga kerja yang berarti bahwa MP_{LA} adalah nol. Kedua, semua pekerja pedesaan menghasilkan output dalam jumlah yang sama sehingga upah riil pedesaan ditentukan berdasarkan produk rata-rata ketimbang produk marginal tenaga kerja (sebagaimana di sektor modern). Produk rata-rata adalah total output (keluaran) atau produk yang dibagi dengan total input faktor (artinya, produk rata-rata tenaga kerja sama dengan total output dibagi dengan jumlah total tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan output. Produk marginal adalah kenaikan total output yang dihasilkan dari penggunaan satu unit tambahan dari sebuah faktor variabel produksi seperti tenaga kerja atau modal (Todaro, 2011:141).

Diagram bagian kiri atas dalam Gambar 2.1a memperlihatkan kurva total produk (fungsi produksi) sektor industri modern. Output barang manufaktur (TP_M) adalah fungsi input variabel tenaga kerja, L_M , untuk persediaan modal, K_M , dan teknologi, t_M , tertentu. Sumbu horizontal menunjukkan jumlah tenaga kerja yang menghasilkan output TP_{M1} , dengan persediaan modal, K_{M1} , dinyatakan dalam ribuan tenaga kerja perkotaan, L_1 . Model Lewis menunjukkan bahwa persediaan modal sektor modern dapat meningkat dari K_{M1} menjadi K_{M2} dan ke K_{M3} sebagai hasil dari penginvestasian kembali laba yang dilakukan para pemilik modal industri (kapitalis). Akibatnya, kurva total produk dalam Gambar 2.1a bergeser ke atas dari $TP_M K_{M1}$ ke $TP_M K_{M2}$ ke $TP_M K_{M3}$. Proses yang akan menghasilkan

laba modal yang diinvestasikan kembali itu digambarkan pada diagram bagian kiri bawah dalam Gambar 2.1a.



Sumber: Todaro, 2011, Pembangunan Ekonomi, hal 142.

Gambar 2.1
Model Lewis: Pertumbuhan Sektor Modern dalam Perekonomian Dua-Sektor dengan Surplus Tenaga Kerja

W_A dalam diagram bawah Gambar 2.1a dan 2.1b menunjukkan tingkat rata-rata pendapatan subsisten riil dalam sektor pedesaan tradisional. W_M dalam Gambar 2.1a adalah upah riil di sektor modern, dimana tingkat upah ini menawarkan tenaga kerja pedesaan yang diasumsikan tidak terbatas atau elastis

sempurna, seperti yang terlihat pada kurva horizontal penawaran tenaga kerja $W_M S_L$. Lewis berasumsi bahwa tingkat upah perkotaan W_M lebih tinggi dari pendapatan rata-rata pedesaan W_A , sehingga pemberi kerja atau pengusaha di sektor modern dapat mempekerjakan sebanyak mungkin surplus tenaga kerja pedesaan yang dapat dilakukan tanpa harus menaikkan upah.

Asumsi Lewis mengenai jumlah persediaan modal, K_{M1} , tetap sama pada awal tahap pertumbuhan sektor modern, maka kurva permintaan tenaga kerja ditentukan oleh penurunan produk marginal tenaga kerja dan ini terlihat dari kurva $D_1 K_{M1}$ yang kemiringannya negatif pada diagram bagian kiri bawah. Hal ini dikarenakan para pemberi kerja sektor modern yang berusaha memaksimalkan perolehan laba diasumsikan akan mempekerjakan tenaga kerja sampai pada jumlah yang menunjukkan bahwa produk fisik marginal sama dengan upah riil (yakni, titik F , yang merupakan perpotongan pada kurva permintaan dan penawaran tenaga kerja), maka total lapangan kerja di sektor modern akan sama dengan L_1 . Total output sektor modern, TP_{M1} , akan terlihat pada bidang yang dibatasi dengan titik-titik $0D_1FL_1$. Oleh sebab itu, bagian dari total output yang dibayarkan kepada pekerja dalam bentuk upah ini akan berjumlah sama dengan bidang bujur sangkar $0W_MFL_1$. Sisa output yang terlihat pada bidang W_MD_1F adalah total laba yang diperoleh pemodal (kapitalis).

Lewis berasumsi bahwa semua laba yang diperoleh akan diinvestasikan kembali, sehingga total persediaan modal dalam sektor modern akan meningkat dari K_{M1} menjadi K_{M2} . Total modal tersedia yang makin besar ini menyebabkan kurva produk total sektor modern bergeser ke $TP_M K_{M2}$, yang pada gilirannya

menyebabkan kenaikan kurva produk marginal tenaga kerja. Pergeseran ke arah luar (*outward shift*) ini diperlihatkan dalam kurva permintaan tenaga kerja dengan garis $D_2 K_{M2}$ pada bagian bawah Gambar 2.1a. Ekuilibrium baru tingkat penyerapan tenaga kerja sektor modern akan berada pada titik G dengan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan sebanyak L_2 . Total output akan meningkat menjadi TP_{M2} atau OD_2GL_2 , sedangkan total upah dan laba masing-masing meningkat menjadi OW_MGL_2 dan W_MD_2G . Laba W_MD_2G akan diinvestasikan kembali, sehingga memperbesar total persediaan modal ke K_{M3} , yang menggeser total produk dan kurva permintaan tenaga kerja ke $TP_M K_{M3}$ dan ke $D_3 K_{M3}$ secara berturut-turut, dan menaikkan tingkat penyerapan tenaga kerja sektor modern ke L_3 . Proses pertumbuhan berkesinambungan (*self-sustaining growth*) dan perluasan kerja ini diasumsikan akan terus berlanjut sampai semua surplus tenaga kerja terserap ke dalam sektor industri baru.

2.1.3.5 Teori Pola Pembangunan Chenery

Analisis pola pembangunan merupakan upaya untuk mengidentifikasi karakteristik proses internal dari transformasi struktural, yang dilalui oleh perekonomian berkembang “pada umumnya” pada saat menghasilkan serta melanjutkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Analisis teori pola pembangunan (*patterns-of-development analysis*) ini memiliki kesamaan dengan model Lewis mengenai perubahan struktural berfokus pada proses yang berlangsung secara berurutan, yang harus dilalui suatu negara di mana ekonomi, industri, dan struktur lembaga negara terbelakang ditransformasi sejalan dengan

waktu agar industri baru dapat menggantikan pertanian tradisional sebagai mesin pertumbuhan ekonomi. Perbedaannya terletak pada tahapan pembangunan, meningkatnya tabungan dan investasi dipandang para analis pola pembangunan sebagai syarat perlu tetapi tidak cukup bagi adanya pertumbuhan ekonomi. Perubahan struktural yang terjadi mencakup hampir semua fungsi perekonomian, mencakup transformasi produksi dan perubahan komposisi permintaan konsumen, perdagangan internasional, serta sumberdaya dan perubahan berbagai faktor sosio-ekonomi seperti urbanisasi, serta pertumbuhan dan distribusi penduduk di suatu negara (Todaro, 2011: 146).

Para analis perubahan struktural empiris menekankan kendala domestik dan internasional terhadap pembangunan. Kendala domestik mencakup kendala ekonomi seperti dukungan sumberdaya suatu negara serta luas wilayah dan jumlah penduduk, serta kendala kelembagaan seperti kebijakan dan tujuan pemerintah. Kendala internasional terhadap pembangunan mencakup akses ke modal eksternal, teknologi, dan perdagangan internasional.

Perubahan struktural yang diamati oleh Chennery dan koleganya di sejumlah negara memiliki hipotesis utama bahwa pembangunan merupakan proses pertumbuhan dan perubahan yang dapat diidentifikasi, yang ciri-ciri utamanya serupa di semua negara. Model ini juga menyadari adanya perbedaan di kalangan negara-negara dalam kaitannya dengan kecepatan dan pola pembangunan, yang bergantung pada lingkungan setiap negara. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembangunan mencakup ketersediaan sumberdaya yang dimiliki dan luas wilayah negara, kebijakan dan tujuan pemerintahannya,

ketersediaan modal dan teknologi eksternal, serta lingkungan perdagangan internasional. Model ini juga memiliki kelemahan yang perlu diperhatikan bahwa, dengan menekankan pola ketimbang teori, pendekatan ini berisiko menggiring para praktisi untuk mengambil keputusan yang salah tentang sebab-akibat (kausalitas). Contohnya dengan mengamati peran penting pendidikan tinggi di negara maju, para pembuat kebijakan mungkin cenderung menekankan pengembangan sistem universitas maju bahkan sebelum mayoritas penduduk telah memperoleh pendidikan dasar, suatu kebijakan yang menimbulkan ketimpangan sangat besar bahkan di negara-negara yang tidak benar-benar berkomitmen untuk meningkatkan pemerataan pendapatan, seperti Tanzania (Todaro, 2011: 147-148).

2.1.4 Pembangunan Ekonomi Daerah

Menurut Arsyad (2010: 374) pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana Pemerintah Daerah dan masyarakatnya mengelola setiap sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Perkembangan kegiatan ekonomi tersebut dapat terjadi jika Pemerintah Daerah dapat mengatasi permasalahan yang terjadi dalam perekonomian daerahnya. Masalah pokok dalam pembangunan daerah terletak pada penekanannya terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada ciri khas (*unique value*) dari daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan,

dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah). Artinya bahwa suatu kebijakan pembangunan dibuat dengan melihat ciri khas dari daerah dan tidak serta merta mengikuti atau mencontoh kebijakan dari daerah lain karena setiap daerah memiliki ciri khas berbeda. Hal ini mengarahkan Pemerintah Daerah dan masyarakat kepada pengambilan keputusan yang tepat dalam memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

2.1.5 Arti Penting Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah

Perencanaan pembangunan ekonomi daerah dapat dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan setiap sumberdaya publik yang tersedia di daerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumberdaya swasta yang bertanggungjawab. Hal ini berarti bahwa perencanaan pembangunan ekonomi daerah ditujukan untuk mengatasi terjadinya masalah seperti pemborosan sumberdaya publik yang mengakibatkan langkanya sumberdaya akibat penggunaan yang tidak bertanggungjawab. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan ekonomi daerah harus dilakukan dengan benar, sehingga dapat mencapai pembangunan ekonomi yang efisien. Pembangunan ekonomi yang efisien membutuhkan suatu proses perencanaan yang teliti mengenai penggunaan sumberdaya publik dan sektor swasta (misalnya petani, pengusaha kecil, koperasi, pengusaha besar, organisasi-organisasi sosial). Perencanaan pembangunan ekonomi daerah, suatu daerah secara keseluruhan

dapat dipandang sebagai suatu unit ekonomi (*economic entity*) yang di dalamnya terdapat berbagai unsur yang berinteraksi satu sama lain (Arsyad, 2010:379).

Ada beberapa alasan perlunya perencanaan pembangunan ekonomi yang dilihat dari sudut pandang ekonomi. Beberapa alasan tersebut meliputi (Arsyad 1999 : 23):

1. Alokasi sumberdaya—sumberdaya pembangunan yang terbatas bisa lebih efisien dan efektif sehingga dapat dihindari adanya pemborosan-pemborosan;
2. Perkembangan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi berkesinambungan;
3. Stabilitas ekonomi tercapai dalam menghadapi siklus konjungtur.

2.1.6 Ciri-Ciri Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan pengembangan suatu daerah memiliki ciri khusus yaitu:

- a. Perencanaan yang berisi upaya untuk mencapai perkembangan ekonomi yang kuat melalui pertumbuhan ekonomi yang positif
- b. Berisi upaya untuk meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat
- c. Berupaya untuk melakukan perubahan struktur perekonomian
- d. Bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat
- e. Terjadinya pemerataan pembangunan (*distributive justice*)

2.1.7 Tahap Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Menurut Blakely (1994), terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui oleh pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah yaitu (Widodo, 2006:61-62):

1. Pengumpulan data dan analisa

Tahap ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah harus mampu untuk mengevaluasi kebutuhan daerah, potensi pengembangan daerah, serta tantangan yang dihadapi dalam pengembangan daerah berdasar pada basis potensial perekonomian. Pengumpulan data ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode *Rapid District Appraisal* yang merupakan suatu cara bagi perencana untuk memperoleh data dengan melakukan dialog langsung kepada masyarakat daerah yang berkepentingan, sehingga metode ini mampu menghasilkan informasi mengenai keadaan nyata daerah.

2. Pemilihan strategi pembangunan ekonomi daerah

Tahap ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah harus menentukan tujuan akhir yang harus dicapai dalam proses pembangunan serta merumuskan strategi yang terbaik untuk mencapai tujuan akhir secara efisien.

3. Pemilihan rancangan pembangunan daerah

Tahap selanjutnya yang harus dilakukan adalah melakukan identifikasi terhadap proyek yang layak untuk dijalankan baik dipandang dari sisi komersial maupun dari sisi masyarakat.

4. Pengembangan kegiatan perencanaan

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah mempersiapkan input yang dibutuhkan oleh proyek yang akan dijalankan. Artinya, Pemerintah Daerah harus mampu mengembangkan sumberdaya manusia di wilayah tersebut.

5. Penentuan kegiatan pembangunan secara detail

Tahap ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah harus melakukan studi kelayakan pendirian sebuah proyek yang dilihat dari berbagai sisi baik sisi ekonomi, politik sosial masyarakat hingga dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkannya.

6. Persiapan dan pelaksanaan rencana pembangunan

Tahap terakhir menunjukkan bahwa rencana kegiatan yang telah terseleksi harus diterjemahkan dalam proses pelaksanaan secara teknis yang mencakup jadwal hingga penentuan program kegiatan pembangunan.

2.1.8 Pengertian Teori Basis Ekonomi

Menurut Tarigan (2010:28) teori basis ekonomi (*economic base theory*) mendasarkan pandangan bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut. Kegiatan ekonomi dikelompokkan menjadi dua yaitu kegiatan basis dan nonbasis. Kegiatan basis adalah kegiatan yang berorientasi ekspor (barang dan jasa) ke luar batas wilayah perekonomian yang bersangkutan. Kegiatan nonbasis adalah kegiatan yang pemasarannya bersifat lokal karena barang dan jasa yang dipasarkan hanya berada di dalam batas wilayah perekonomian yang bersangkutan.

Sektor basis berperan sebagai penggerak utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Hal ini berarti bahwa hanya kegiatan basis yang mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Oleh karena itu, semakin besar ekspor yang dilakukan oleh suatu wilayah ke wilayah lain maka akan semakin maju pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut, dan demikian

sebaliknya semakin kecil ekspor yang dilakukan oleh suatu wilayah ke wilayah lain maka akan semakin lambat pertumbuhan ekonomi yang terjadi di wilayah tersebut. Peningkatan aktifitas sektor basis akan menimbulkan efek peningkatan pendapatan atau yang disebut efek ganda (*multiplier effect*) dalam perekonomian regional.

2.1.9 Cara Memilah Kegiatan Basis dengan Nonbasis

Berikut ini beberapa metode untuk memilah antara kegiatan basis dan kegiatan nonbasis (Tarigan, 2010: 32-35):

1) Metode Langsung

Metode langsung dapat dilakukan dengan survei langsung kepada pelaku usaha, kemana mereka memasarkan barang yang diproduksi dan dari mana membeli bahan-bahan kebutuhan untuk menghasilkan produk tersebut. Berdasarkan jawaban yang diberikan, dapat ditentukan berapa persen produk yang dijual keluar wilayah dan beberapa persen dijual di dalam wilayah.

2) Metode Tidak Langsung

Salah satu metode tidak langsung adalah dengan menggunakan asumsi atau disebut metode asumsi. Metode asumsi, berdasarkan kondisi di wilayah tersebut (berdasarkan data sekunder), ada kegiatan tertentu yang diasumsikan sebagai kegiatan basis dan kegiatan lainnya sebagai kegiatan nonbasis. Kegiatan yang mayoritas produknya dijual keluar wilayah atau mayoritas uang masuknya berasal dari luar wilayah langsung dianggap basis. Kegiatan nonbasis yaitu kegiatan yang

mayoritas produknya dipasarkan lokal, dalam metode asumsi, kegiatan lain yang bukan dikategorikan basis adalah otomatis menjadi kegiatan nonbasis.

3) Metode Campuran

Suatu wilayah yang sudah berkembang, membutuhkan banyak usaha yang tercampur antara kegiatan basis dan kegiatan nonbasis. Penggunaan metode asumsi murni akan memberikan kesalahan yang besar. Penggunaan metode langsung yang murni juga cukup berat, sehingga yang sering dilakukan orang adalah gabungan antara metode asumsi dengan metode langsung yang disebut metode campuran. Metode campuran yaitu metode pengumpulan data sekunder, biasanya dari instansi pemerintah atau lembaga pengumpul data seperti Badan Pusat Statistik (BPS), selanjutnya dianalisis untuk ditentukan kegiatan mana yang dianggap basis dan nonbasis.

4) Metode *Location Quotient*

Metode lain yang tidak langsung adalah dengan menggunakan *Location Quotient* (LQ). Metode LQ membandingkan porsi lapangan kerja/nilai tambah untuk sektor tertentu di wilayah dengan porsi lapangan kerja/nilai tambah untuk sektor yang sama secara nasional. Bentuk rumusnya dituliskan sebagai berikut (Tarigan, 2010: 35):

$$LQ = \frac{1_i}{L_i} \frac{e}{E}$$

Keterangan:

1_i = Banyaknya lapangan kerja sektor i di wilayah analisis

e = Banyaknya lapangan kerja di wilayah analisis

L_i = Banyaknya lapangan kerja sektor i secara nasional

E = Banyaknya lapangan kerja secara nasional

Catatan: Istilah nasional adalah wilayah yang lebih tinggi jenjangnya. Misalnya, apabila wilayah analisis adalah provinsi maka wilayah nasional adalah wilayah negara. Apabila wilayah analisis adalah wilayah kabupaten/kota maka istilah nasional digunakan untuk wilayah provinsi, dan seterusnya.

Rumus tersebut menunjukkan bahwa apabila $LQ > 1$ berarti porsi lapangan kerja sektor i di wilayah terhadap total lapangan kerja wilayah adalah lebih besar dibandingkan dengan porsi lapangan kerja untuk sektor yang sama secara nasional. Hal ini berarti bahwa sektor i di wilayah secara proporsional dapat menyediakan lapangan kerja melebihi porsi sektor i secara nasional. $LQ > 1$ memberikan indikasi bahwa sektor tersebut adalah basis, sedangkan apabila $LQ < 1$ berarti sektor itu adalah nonbasis.

2.1.10 Analisis Pergeseran Sektor (Perubahan Struktur Ekonomi)

Pergeseran sektor akan dianalisis dengan menggunakan analisis *Shift-Share*. Analisis *Shift-Share* merupakan teknik yang sangat berguna dalam menganalisis pergeseran sektor/perubahan struktur ekonomi daerah dibanding perekonomian nasional. Tujuannya untuk menentukan kinerja/produktivitas kerja perekonomian daerah, membandingkannya dengan daerah yang lebih besar (regional/nasional). Analisis ini memberikan data tentang kinerja perekonomian dalam tiga bidang yang saling berhubungan satu sama lain yaitu (Arsyad, 2010:389):

1. Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan cara menganalisis perubahan kesempatan kerja agregat secara sektoral dibandingkan dengan perubahan pada sektor yang sama di perekonomian yang dijadikan acuan.
2. Pergeseran proposional (*proportional shift*) mengukur perubahan relatif, pertumbuhan atau penurunan pada daerah dibandingkan dengan perekonomian yang lebih besar yang dijadikan acuan. Pengukuran ini memungkinkan untuk mengetahui apakah perekonomian daerah terkonsentrasi pada industri-industri yang tumbuh lebih cepat dibandingkan perekonomian yang dijadikan acuan.
3. Pergeseran diferensial (*differential shift*) membantu dalam menentukan seberapa jauh daya saing industri daerah (lokal) dengan perekonomian yang dijadikan acuan. Oleh karena itu, jika pergeseran diferensial dari suatu industri adalah positif maka industri tersebut lebih tinggi daya saingnya dibandingkan dengan industri yang sama pada perekonomian yang dijadikan acuan.

2.2 Studi Terkait

Studi terkait mengenai pergeseran sektor ekonomi basis telah banyak dilakukan diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Tuandali et al. (2017) yang meneliti tentang Analisis Pergeseran Struktur Ekonomi dan Sektor Unggulan Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara Periode 2010-2014. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah terjadi pergeseran struktur ekonomi dan sektor-sektor apa yang menjadi sektor basis serta sektor unggulan dalam

perekonomian di Kabupaten Halmahera Utara yang dapat dikembangkan. Penelitian ini menggunakan analisis *Shift-Share*, analisis *Location Quotient* (LQ), analisis *Overlay*. Hasil penelitian berdasarkan analisis *Shift-Share* menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan struktur ekonomi di Kabupaten Halmahera Utara dari sektor primer ke sektor sekunder. Analisis *Overlay* dan *Location Quotient* menunjukkan sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat, dan merupakan sektor basis yaitu sektor Pengadaan Listrik, sektor Pengelolaan Sampah, sektor Konstruksi, sektor Perdagangan, Reparasi Mobil, sektor Transportasi, sektor Penyediaan Akomodasi, sektor Informasi, sektor Jasa Keuangan, sektor *Real Estate*, sektor Jasa Perusahaan, sektor Administrasi Pemerintahan, sektor Pertahanan, sektor Jasa Kesehatan, dan sektor Pertambangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Kamarudin (2015) yaitu Analisis Potensi Sektor Ekonomi Kabupaten Jember. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kinerja sektoral agregat perekonomian, karakteristik dari pertumbuhan ekonomi dilihat dari konsentrasi sektoral dan subsektoral, dan sektor basis di Kabupaten Jember. Alat analisisnya yaitu *Location Quotient* (LQ), *Dynamic Location Quotient* (DLQ), *Coefficient Reshuffle* (CR). Hasilnya menunjukkan bahwa sektor unggulan di Kabupaten Jember adalah sektor Pertanian, sektor Pertambangan, sektor Keuangan, Persewaan dan sektor Jasa Perusahaan serta sektor Jasa.

Ma'mun dan Irwansyah (2012), meneliti tentang Analisis Pergeseran Struktur Ekonomi dan Identifikasi Sektor Potensial Wilayah Pengembangan (Studi Kasus di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat). Tujuan penelitiannya adalah menganalisis pergeseran struktur dan sektor potensial untuk

pengembangan Kabupaten Bekasi. Alat analisis yang digunakan yaitu *Location Quotient*, *Shift-Share* Klasik, dan analisis *Shift-Share* Modifikasi Esteban Marquillas (SS – EM). Hasil analisis *Shift-Share* dilihat dari kontribusi sektoral terhadap pergeseran pertumbuhan total pada PDRB masing-masing wilayah pengembangan dalam kurun waktu tahun 2004-2010, di wilayah pengembangan I belum terjadi pergeseran struktur ekonomi, sedangkan di wilayah pengembangan II, III dan IV telah terjadi transformasi struktur ekonomi, yaitu dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Berdasarkan hasil analisis gabungan, potensi sektor Pertanian dan sektor Pengangkutan terdapat di wilayah pembangunan I, II dan IV, potensi sektor Pertambangan hanya terdapat di wilayah pengembangan I, potensi sektor Industri Pengolahan hanya terdapat di wilayah pembangunan III, potensi sektor Bangunan terdapat di wilayah pembangunan II dan IV, potensi sektor Perdagangan terdapat di wilayah pembangunan IV, potensi sektor Keuangan hanya terdapat di wilayah pembangunan II.

Harsono (2012) meneliti tentang Analisis Sektor Basis dan Pergeseran Struktur Perekonomian Kabupaten Sekadau. Tujuannya untuk mengetahui dan menganalisis basis ekonomi serta struktur perekonomian. Alat analisis yang digunakan yaitu *Location Quotient* (LQ), *Shift-Share*, dan Tipologi Klassen. Penelitian ini menunjukkan bahwa sektor ekonomi basis di Kabupaten Sekadau ada 2 (dua) sektor dari 9 (sembilan) yakni sektor Pertanian dengan LQ rata rata 1,92 dan sektor Pertambangan dan Penggalian dengan LQ rata rata 1,74. Berdasarkan hasil *Shift-Share* bahwa semua sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Sekadau mengalami pertumbuhan yang baik dengan total nilai

pertumbuhan rata rata sebesar 6,05 persen dari tahun 2004 hingga tahun 2010. Analisis Tipologi Klassen menunjukkan bahwa pada kuadran I ada sektor Pertanian, kuadran II ada sektor Listrik, Gas dan Air Bersih, kuadran III ada sektor Bangunan dan sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, dan terakhir kuadran IV ada sektor sektor Industri Pengolahan, dan sektor Keuangan

Chohiri (2009) meneliti tentang Analisis Perubahan Struktur Ekonomi dan Identifikasi Sektor Unggulan di Kabupaten Cilacap Pada Masa Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah. Penelitian ini menggunakan analisis *Location Quotient* (LQ), *Dynamic Location Quotient* (DLQ), analisis *Shift-Share*, Tipologi Klassen serta Uji Beda Dua Mean. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ada 3 sektor unggulan pada masa sebelum otonomi daerah (sektor Pertanian, sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan, sektor Pertambangan dan Penggalian) dan ada 5 sektor unggulan di masa sesudah otonomi daerah (sektor Pertanian, sektor Keuangan, sektor Pertambangan, ditambah sektor Listrik, Gas dan sektor Pengangkutan). Analisis *Shift-Share* mengindikasikan bahwa laju pertumbuhan sektor-sektor ekonomi Kabupaten Cilacap sebelum otonomi daerah lebih cepat, sedangkan sesudah otonomi daerah laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cilacap lebih rendah, akibat bauran industri cenderung mengarah pada perekonomian yang akan tumbuh relatif lambat serta memiliki daya saing rendah.

Penelitian yang selanjutnya, dilakukan oleh Nazipawati (2007) tentang Aplikasi Model *Static* dan *Dynamic Location Quotient* dan *Shift-Share* dalam Perencanaan Ekonomi Regional Studi Kasus Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Provinsi Sumatera Selatan. Tujuannya untuk menentukan sektor-sektor

basis di Kabupaten OKU dan melihat bagaimana komponen pertumbuhan ekonomi Kabupaten OKU berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan. Metode yang digunakan yaitu Model *Static Location Quotient* (SLQ) dan *Dynamic Location Quotient* (DLQ) dan *Shift-Share*. Hasil analisis SLQ dan DLQ menunjukkan bahwa sektor yang berpotensi unggul yaitu sektor Perdagangan, sektor Keuangan, dan sektor Jasa Perusahaan. Analisis *Shift-Share* menunjukkan bahwa semua sektor di Kabupaten OKU memiliki nilai keunggulan kompetitif yang negatif.

Selain itu ada juga penelitian yang dilakukan oleh Rudatin (2003) mengenai Analisis Sektor Basis dalam Rangka Pengembangan Pembangunan Wilayah Studi Kasus: Kabupaten di Jawa Tengah Tahun 1996-2001. Tujuannya untuk mengetahui sektor-sektor yang dapat diunggulkan di masing-masing daerah untuk pemilihan prioritas sektor basis sebagai salah satu dasar pengembangan yang akan dilaksanakan. Penelitian ini menggunakan metode *Location Quotient*, *Shift-Share*, dan Tipologi Klassen. Penelitian ini menunjukkan bahwa 22 Kabupaten mempunyai sektor basis seperti sektor Pertanian, sektor Keuangan, Sewa dan sektor Jasa Perusahaan, dan sektor Jasa. Analisis *Shift-Share* menunjukkan bahwa sektor Pertambangan dan Penggalan tidak mempunyai keunggulan yang kompetitif, hanya sektor Pertanian, sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran saja yang mempunyai spesialisasi. Tipologi Klassen menunjukkan bahwa 2 Kabupaten merupakan daerah maju, 4 Kabupaten merupakan daerah maju tapi tertekan, 9 Kabupaten merupakan daerah berkembang cepat, dan 14 Kabupaten merupakan daerah relatif tertinggal.